

MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN POLA KEMITRAAN MELALUI PEMANFAATAN DANA STIMULAN BAGI MASYARAKAT PESISIR

Kelompok Kerja
Pembinaan Kursus dan Pelatihan
(BINSUSLAT)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
(BP PAUDNI) REGIONAL III MAKASSAR
TAHUN 2012



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern yang dicirikan dengan tumbuhnya *learning society* untuk mencapai *knowledge based society* yang menjadi pilar utama tumbuhnya industri kreatif, maka layanan pendidikan nonformal sangat penting. Kebutuhan belajar yang semakin kompleks sementara keterbatasan waktu dan pembiayaan menuntut adanya layanan pendidikan nonformal yang dicirikan dengan model layanan pendidikan yang fleksibel dalam aturan waktu, adanya keterjangkauan karena tempatnya selalu mendekat pada subyek belajar, murah pembiayaan namun tetap mengutamakan kualitas layanan dan proses, serta produknya.

Data (Sakernas, BPS 2008) menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di wilayah perkotaan sebanyak 5.296.426 sedangkan di wilayah pedesaan, pesisir dan kepulauan sebanyak 4.131.174. Populasi penduduk pengangguran lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peluang kerja yang tersedia di pedesaan menyebabkan terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Jika tidak segera ditangani, akan memungkinkan perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin besar di masa datang.

Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional V Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Ditjen PNFI, salah satu tugas pokoknya adalah pengembangan dan pengkajian program PNFI. Wilayah kerja BPPAUDNI Regional III merupakan daerah pesisir dan kepulauan. Tercatat pada tahun 2009 jumlah pulau yang berpenghuni kurang lebih 436 pulau (Dep. Kelautan, 2009).

Mata pencaharian penduduk pada daerah kawasan pesisir dan kepulauan pada umumnya dibagi atas empat; yaitu home industri, pedagang/distribusi, petani/nelayan dan buruh nelayan.

- a. Home industri yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil perikanan. Hal ini bisa berupa mengolah hasil tangkapan ikan, atau kerajinan dari sumberdaya laut.
- b. Pedagang/distributor
Para pelaku ekonomi ini mendistribusikan hasil perikanan, baik berupa perikanan hasil tangkapan nelayan maupun home industri, dan kebanyakan masyarakat pesisir terutama yang pendatang lebih banyak bergerak disektor ini.
- c. Petani/nelayan
Petani nelayan adalah nelayan pemilik modal, pelaku ekonomi ini menyewakan peralatan nelayan baik berupa alat tangkap maupun kapal dengan sistem kerja bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang bergerak di sektor ini adalah para pendatang. Kelompok ini biasanya disebut *punggawa* atau juragan. Walaupun jumlahnya sedikit, cukup berpengaruh di daerah pesisir dan pulau karena sebagian besar penduduk sangat menggantungkan hidupnya pada kelompok ini.
- d. Buruh/nelayan
Buruh nelayan adalah nelayan/buruh yang tidak mempunyai modal, dia hanya bermodalkan badan, dan yang bergerak di sektor ini adalah para nelayan tetap atau penduduk asli. Kelompok ini biasa juga disebut *sawi*, hidupnya sangat tergantung *punggawa*. Kelompok ini merupakan kelompok besar di daerah pesisir.

Pendidikan kursus belum sepenuhnya mampu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap kepada masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, yang bertujuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir kepulauan

dalam bentuk pengembangan jiwa usaha masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan kewirausahaan.

Hasil laporan data eksplorasi yang telah dilakukan, keterkaitannya dengan konsep pengembangan yang akan dilakukan memperlihatkan aspek yang menjadi fokus perhatian dalam merancang kegiatan pengembangan model dengan mengacu pada ;

1. Taraf pendidikan masyarakat pada daerah/wilayah pesisir masih rendah, hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat yang lebih memilih bekerja mencari nafkah untuk dapat menopang perekonomian keluarga.
2. Jenis pekerjaan yang mendominasi pada daerah pesisir adalah nelayan tangkap dan buruh nelayan, yang mana mereka adalah sebagai pekerja dan bukan pemilik modal, selain itu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan masih tergolong nelayan tradisional yang penghasilannya tidak menentu.
3. Pada bulan tertentu masyarakat pesisir tidak beraktifitas sebagai nelayan, sehingga tidak dapat menopang perekonomian keluarga. Pada musim barat, masyarakat pesisir lebih banyak berdiam diri karena tidak mempunyai keterampilan lain selain sebagai nelayan.

Secara keseluruhan hasil dari pendataan yang dilakukan, yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan model adalah sasaran usia produktif yang tidak sekolah dan putus sekolah, mata pencaharian masyarakat yang tergolong nelayan tradisional, jenis usaha yang ada ditengah tengah masyarakat yang dapat menunjang peningkatan ekonominya serta kemitraan dalam penyelenggaraan yang pernah dilakukan oleh lembaga pendidikan nonformal.

Pengembangan model yang dilakukan nantinya mengacu pada pola penerapan kemitraan dalam mendukung keterampilan masyarakat melalui metode pemanfaatan dana stimulan atau rintisan dalam membangun dan mengembangkan usaha dari hasil belajar peserta didik. penerapan sesuai dengan masukan yang ada dan arah dari pengembangan model pada yang akan dibangun, yang meliputi ;

1. Mekanisme rekrutmen peserta didik masih perlu di perhatikan guna menyesuaikan dengan jenis keterampilan yang dikembangkan.
2. Penerapan pembelajaran oleh instruktur perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan pedoman kurikulum dan bahan ajar.
3. Penerapan pembelajaran oleh instruktur agar metode yang digunakan adalah metode partisipatif yang lebih banyak menekankan pada peserta didik untuk berpartisipasi aktif.
4. Keterkaitan antara materi inti agar dikembangkan oleh instruktur terkait dengan kompetensi yang akan dihasilkan.
5. Mendiskusikan dengan instansi terkait agar mendukung melalui sharing pendanaan.
6. Perlu adanya pola pendampingan dalam hal kemandirian usaha masyarakat guna mendukung peningkatan pengetahuan melalui aplikasi sebagai bagian dari tindak lanjut pasca pendidikan dan pelatihan.

Dari poin yang ada diatas maka dalam uji coba nantinya telah dapat diterapkan, serta lebih menyempurnakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan. Adapun inti pengembangan mengacu pada pola pendampingan dana stimulant/rintisan melalui kewirausahaan dalam bentuk usaha baik dilakukan secara kelompok maupun mandiri.

Pengembangan konsep pendampingan perlu dilakukan karena dari beberapa informasi dan hasil penerapan model yang menjadi kelemahan para peserta didik adalah proses memulai usaha dan terutama dari sisi pemanfaatan dana guna mencapai kemandirian, sehingga keterlibatan mitra dalam pendampingan menjadi kunci pokok dalam konsep ini, pendampingan yang dilakukan dalam penerapan uji coba model terfokus pada pendidikan dan pelatihan serta pasca pelatihan yang dilakukan oleh mitra/instansi yang terkait dengan kegiatan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyelenggaraan kursus kewirausahaan bagi masyarakat di daerah pesisir melalui pola kemitraan dalam pemanfaatan dana stimulan.
2. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana stimulan melalui pola kemitraan dalam menstimulus kewirausahaan bagi masyarakat di daerah pesisir.

C. Tujuan Pengembangan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pengembangan adalah menemukan model penyelenggaraan kursus yang efektif dan efisien bagi masyarakat di daerah pesisir dengan konsep kewirausahaan menggunakan pola kemitraan dalam pemanfaatan dana stimulan.

2. Tujuan Khusus

- a. Merancang model penyelenggaraan kursus kewirausahaan bagi masyarakat di daerah pesisir melalui pola kemitraan dalam pemanfaatan dana stimulan.
- b. Merumuskan panduan model penyelenggaraan kursus kewirausahaan bagi masyarakat di daerah pesisir melalui pola kemitraan dalam pemanfaatan dana stimulan.

D. Hasil yang Diharapkan

Pengembangan model ini diharapkan dapat menghasilkan model kemitraan kewirausahaan dalam pemanfaatan dana stimulan kursus bagi masyarakat di daerah pesisir yang mencakup :

1. Naskah akademik model
2. Panduan penggunaan model
3. Panduan pengembangan kurikulum kemitraan
4. Panduan pembuatan bahan ajar
5. Panduan pemanfaatan dana stimulan kewirausahaan

6. Panduan Pengembangan Kemitraan

E. Manfaat

1. Ditjen PNFI

Sebagai bahan acuan bagi Direktorat yang terkait dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat pesisir dan kepulauan

3. Lembaga Penyelenggara

Sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

4. Tenaga Pendidik

Sebagai bahan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

F. Pengguna

1. Ditjen PNFI

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Lembaga penyelenggara PNF

4. Tenaga Pendidik PNF

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

1. Hakekat dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dapat berlangsung sepanjang hayat, baik melalui pendidikan informal, non formal maupun formal.

Pengertian tersebut sejalan dengan rumusan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat (1) (2003:3) yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pengertian pendidikan tersebut di atas, jelas bahwa pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal merupakan upaya untuk mendewasakan manusia dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang akan menjadi bekal bagi kehidupan setiap individu, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan agama.

Indrakusuma (1989:46) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan pada intinya adalah “mendidik anak agar dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Baik berguna bagi dirinya sendiri maupun berguna bagi masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Abu ahmadi (2001:103) bahwa “tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas pendidikan seharusnya diarahkan ke sana demi tercapainya tujuan umum tersebut”.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan sangat penting dalam mengembangkan kemampuan dan kepribadian sumber daya manusia. Dengan melalui pendidikan setiap orang dapat belajar atau diajar dengan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan berdasarkan kurikulum, jenis dan jenjang pendidikan yang diikutinya yang memungkinkan dapat mengembangkan potensi dirinya.

Dalam kaitan itu, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan sangat menentukan dan oleh karena itu diperlukan beberapa strategi. Strategi yang dimaksud menurut Tilaar (1999:169) antara lain: 1) Pendidikan dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat.

Pendidikan dari masyarakat mengandung makna bahwa pendidikan haruslah memberikan jawaban kepada kebutuhan (needs) dari masyarakat sendiri. Pendidikan bukanlah sesuatu yang dituangkan dari atas atau dari kepentingan pemerintah semata-mata, tetapi pendidikan itu tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri dan berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. 2) Proses pendidikan mencakup proses hominisasi dan proses humanisasi. Di dalam proses hominisasi, manusia dikembangkan sebagai makhluk hidup. Manusia harus dibesarkan agar dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kehidupan biologis yang membutuhkan makanan bergizi, kebutuhan seks, kehidupan ekonomi, termasuk mempunyai lapangan kerja sendiri. Dengan proses humanisasi berarti manusia itu bukan hanya sekedar dapat hidup dan makan, tetapi juga bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap kesejahteraan masyarakat. 3) Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi mengandung unsur-unsur: (a) manusia memerlukan

kebebasan politik, (b) Kebebasan intelektual, (c) Kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (*self realization*), (d) Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok, (e) Pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda (*the right to be different*), dan (f) Percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Secara nasional pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani.

Salah satu upaya mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang antara lain mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (3) dijelaskan bahwa pendidikan nonformal meliputi kursus, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dari berbagai jenis pendidikan nonformal tersebut di atas, bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan bekerja pada dunia usaha.

Tilaar (2000) mengemukakan pokok-pokok paradigma baru pendidikan, yaitu: (1) pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis, (2) masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis, (3) pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal dan global, (4) pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis, (5) dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan kompetitif dalam rangka kerjasama, (6) pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat, dan (7) pendidikan harus mampu mengindonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru dengan prinsip-prinsip: (a) partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan (*community based education*), (b) demokratisasi proses pendidikan, (c) sumber daya pendidikan yang profesional, dan (d) sumber daya penunjang yang memadai.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar pendidikan formal yang oleh karena seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam

lingkungan keluarganya, pekerjaannya, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (2) yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Layanan program PNF dicirikan oleh program pembelajaran yang terencana (*planned learning programmes, planned learning opportunities*). Program terencana tersebut terorganisasi secara relatif longgar dan luwes. Tidak seperti pendidikan informal yang relatif tak terorganisasi dan tidak sistematis. Juga, tidak seperti pendidikan formal (sistem persekolahan) yang terorganisasi secara hirarkis-kronologis sedemikian ketat. PNF berada di antara keduanya; diselenggarakan secara terencana dan sistematis, akan tetapi pengorganisasian program pembelajarannya bersifat longgar dan luwes (Coombs, 1973: 11).

Layanan program PNF yang terorganisasi secara longgar dan luwes dipandang sebagai keunikan, potensi dan keunggulan PNF. Sehingga layanan program PNF dapat lebih leluasa merespons berbagai kebutuhan belajar dalam masyarakat yang memerlukan pelayanan segera, mendesak, dan bisa berubah secara dinamis mengikuti tuntutan ruang dan waktu beserta kemajemukan yang ada. (Faisal, 2007: 14).

Sifat longgar dan luwes program layanan PNF dapat dipandang sebagai terobosan yang sangat inovatif di dunia pendidikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa PNF berpotensi lebih sigap, tanggap, dan lincah dalam mengakomodasi tuntutan kenyataan riil di lapangan. Yang diperlukan adalah daya tanggap, kecerdikan, kreativitas, dan panggilan jiwa untuk memberikan yang terbaik bagi kebaikan dan kepentingan peserta didik (warga belajar).

Modal utama tenaga profesional pendidikan nonformal untuk dapat mengelola Program Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional, PAUD dan POD secara efektif, efisien dan menjanjikan, adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan nonformal (PNF) yang mereka pahami dan kuasai, khususnya prinsip; demokratis, terbuka, kesetaraan, kebebasan, partisipatif, kelenturan dan kesukarelaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip PNF, tenaga profesional pendidikan nonformal dapat memanfaatkan “potensi unggul” yang dimiliki PNF itu sendiri yang terkandung dalam karakteristik program pembelajarannya yang terorganisasi secara relatif longgar dan luwes.

Untuk itulah pengelola pendidikan nonformal memiliki tugas: memimpin, memotivasi, merencanakan, mengorganisir, memonitor, membangun komunikasi dan menciptakan suasana kerja yang didasari oleh keimanan, ahlak mulia dan panggilan jiwa. Disamping itu pengelola pendidikan kesetaraan hendaknya: 1) mampu membangkitkan kesadaran kritis peserta didik (warga belajar), 2) mengabdikan pada kemanusiaan dan kebangsaan, 3) tidak mengorbankan hak peserta didik untuk berkembang, 4) kegiatan pengelolaan berorientasi pada peserta didik, 5) relevan dengan kehidupan lokal, dan 6) optimal menggunakan sumberdaya lokal. Pengelola hendaknya memahami dengan baik tentang pemihakan kepada peserta didik artinya semua kegiatan yang dikelola adalah untuk kepentingan peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik harus dilakukan sehingga pengelola dapat melakukan prediksi secara tepat dan mengendalikannya secara tepat pula. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik (*learner centered*) harus menjadi salah satu prinsip pengelolaan, karena itu belajar merupakan bagian utama ketimbang mengajar. Keaktifan peserta didik dan pemberian pengalaman harus diutamakan karena belajar adalah *personal involvement* dan *individual activity* (Rogers, 1980).

Pengelola harus mengadakan fasilitator secukupnya untuk terjadinya aktifitas belajar dan pemberian pengalaman belajar secara optimal.

Patricia Cross (1986) menganjurkan kepada para pengelola PNF agar mereka memahami mengapa seorang mau berpartisipasi sebagai warga belajar dan mengapa tidak mau. Oleh karena itu para pengelola hendaknya mempelajari dengan baik prinsip-prinsip motivasi, karena sering kali ditemukan Kelompok belajar memiliki pasang surut yang sangat cepat, satu saat kadang-kadang pesertanya banyak, kadang-kadang sedikit, bahkan tidak jarang tutup. Kemampuan para pengelola dalam mengatur *incentive*, *reward*, dan memberikan daya tarik lainnya menjadi sangat penting.

Di samping ciri pengelolaan di atas, diperlukan kepribadian yang melekat pada pengelola yaitu; pola perilaku, relasi sosial, keteladanan, jiwa sosial, semangat, tahan uji, dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang semua itu merupakan kunci keberhasilan PNF.

3. Kursus

Bimbingan keterampilan bermata pencaharian/kewirausahaan merupakan layanan pendidikan kepada peserta didik untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mampu menghasilkan karya yang bermanfaat, dapat dijual dan inovatif. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja, namun memiliki kemampuan dasar pendukung secara fungsional seperti membaca, menulis, berhitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumberdaya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja dan mempergunakan teknologi (Satori *dalam* Anwar, 2004).

Kursus (*Life Skill*) merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan hidup secara tepat guna dan berdaya guna. Program pendidikan *Life Skill* merupakan pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan

kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Penyelenggaraan kursus pada satuan Pendidikan Non Formal difokuskan pada upaya pembelajaran yang dapat memberikan penghasilan yang berbasis pada "*broad based education*" dengan mengacu kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar dan potensi lokal dan tak lepas dari peningkatan SDM dan pemanfaatan SDA.

Kecakapan Hidup melalui Pendidikan Non Formal diselenggarakan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap warga belajar dibidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat dan potensi diri yang mengacu pada potensi fisik dan jiwanya sesuai dengan potensi lingkungan, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri.

4. Kewirausahaan

Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dll. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama.

Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), eksplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921), dan mendapatkan secara bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803). Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Richard Cantillon (1775)

Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-employment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi

definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian.

Penrose (1963)

Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam system ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan.

Harvey Leibenstein (1968, 1979)

Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya.

Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio

Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian.

Peter F. Drucker

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Zimmerer

Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). Kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan

dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Maka dibutuhkan kreatifitas, yaitu pola pikir tentang sesuatu yang baru, serta inovasi, yaitu tindakan dalam melakukan sesuatu yang baru.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik suatu model pengembangan yang berpihak padamasyarakat pesisir dan kepulauan melalui kursus bagi buruh/nelayan melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dalam memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya.

5. Pesisir

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Apabila dilihat dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir memiliki dua kategori batas, yaitu: batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Dari pengertian tersebut maka pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah di antara daratan berbatasan dengan laut; batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan instrusi garam. Sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Dietriech Bengen, 2001).

Wilayah pesisir merupakan suatu pertemuan antara daratan dengan perairan, sehingga menyebabkan tingginya tingkat keterkaitan dan saling mempengaruhi antara ekosistem di daratan dengan ekosistem di pesisir.

Dengan kondisi tersebut, maka ekosistem pesisir dan laut menyediakan sumber alam yang produktif, baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata (Rohmin Dahuri;1996).

Kawasan pesisir merupakan tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat cukup beragam. Namun yang menjadi masalah adalah masyarakat pesisir yang mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari tergantung pada sumberdaya pesisir masih bergelut dengan kemiskinan (Supriharyono;2000).

Kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Home industri yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil perikanan. Hal ini bisa berupa mengolah hasil tangkapan ikan, atau kerajinan dari sumberdaya laut;
2. Pedagang/distribusi
Para pelaku ekonomi ini mendistribusikan hasil perikanan, baik berupa perikanan hasil tangkapan nelayan maupun home industri, dan kebanyakan masyarakat pesisir terutama yang pendatang lebih banyak bergerak disektor ini;
3. Petani/nelayan
Yang dimaksud petani nelayan adalah nelayan pemilik modal, pelaku ekonomi ini menyewakan peralatan nelayan baik berupa alat tangkap maupun kapal dengan sistem kerja bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang bergerak di sektor ini adalah para pendatang.
4. Buruh/nelayan
Yang dimaksud masyarakat adalah nelayan/petani buruh yang tidak mempunyai modal, dia hanya bermodalkan badan, dan yang bergerak di sektor ini adalah para nelayan tetap atau penduduk asli.

6. Pendampingan

Dikalangan dunia pengembangan masyarakat istilah “pendampingan” merupakan istilah baru yang muncul sekitar 90-an, sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada *Pembinaan* dan yang *dibina*, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinan sedangkan yang dibina adalah masyarakat.

Istilah pendampingan dimunculkan, menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subjek utamanya, sedang pendamping lebih bersifat membantu saja. Dengan demikian pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik (tidak berarti punya pendidikan formal) (*Bintang ; pengertian pendampingan. Rabu 29 Desember 2010: Blogger*).

Pendampingan sendiri bermakna bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

7. Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kerjasama (kemitraan) yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Dapat diartikan pula bahwa “kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan”. Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu “pembinaan dan pengembangan”, karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti “mempunyai kelemahan dan kelebihan”, dan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

Kemitraan menurut peraturan yang telah dibakukan sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Pasal 25 adalah ;

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
 - (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
 - (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1. “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.
- c. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Pasal 1 angka 3, Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

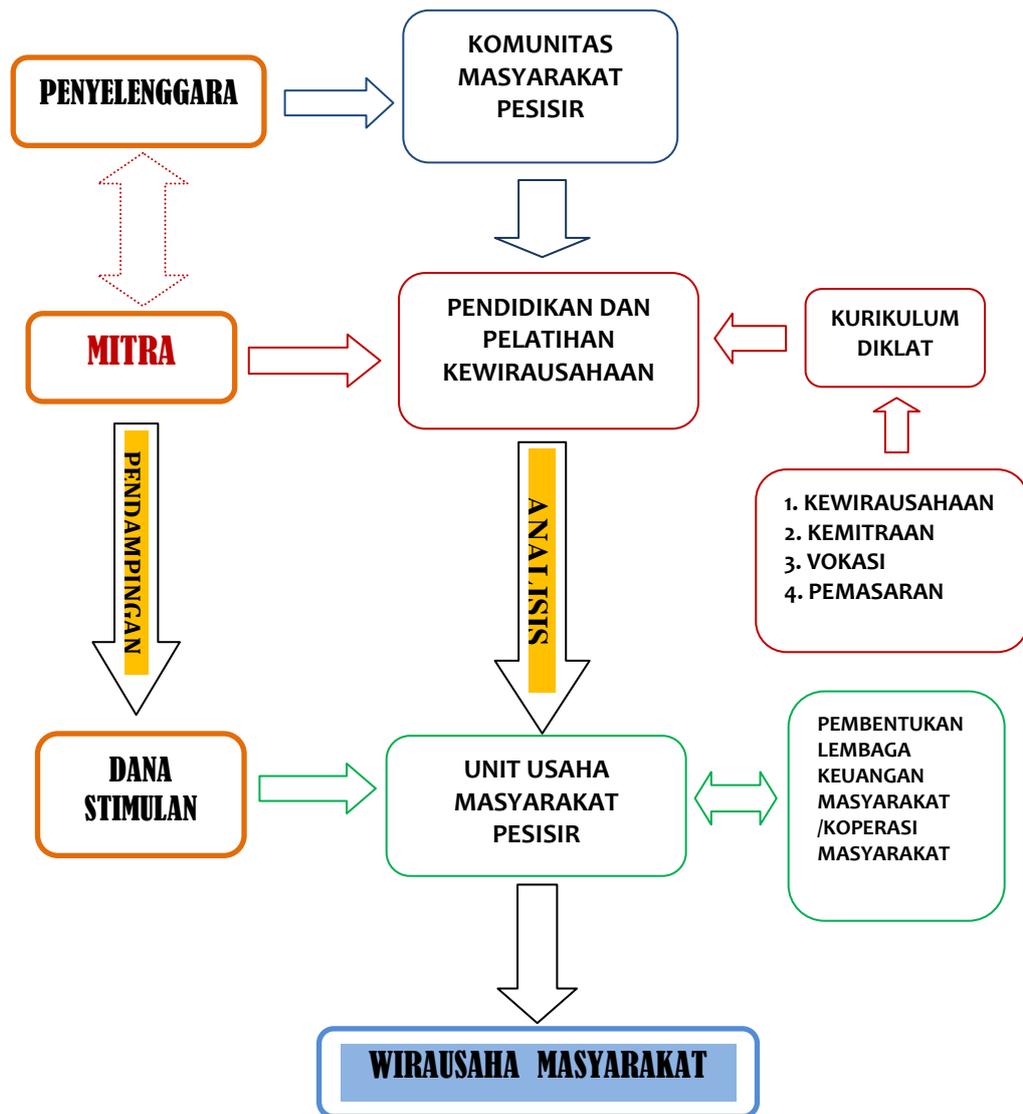
Definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan

kesejahteraan bersama. Konsep "kemitraan" seharusnya bermakna sebagai bentuk kerjasama yang sejajar dan sukarela. Dalam konsep kemitraan semua pihak harus menjadi stakeholders dan berada dalam derajat subyek-subyek bukan subyek-obyek, sehingga pola yang dijalankan adalah pola kesetaraan dan kebersamaan.

Esensi kemitraan jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal keuangan tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan usaha.

BAB III KARASTERISTIK MODEL

A. Kerangka Model



Bagan 1. Skema Pengembangan Kemitraan Berbasis Wirausaha

Kerangka pikir ini bertujuan untuk menggambarkan rancangan pelaksanaan pengembangan yang bertujuan memberikan arah dan capaian hasil dari suatu perencanaan, sehingga tidak menimbulkan bias dalam proses pengembangan yang dilakukan.

Gambaran kerangka pikir dalam pengembangan model ini bertujuan bagaimana mengembangkan kemitraan dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan wirausaha masyarakat pesisir dengan pemanfaatan dana stimulan yang disuntikkan ke kelompok belajar sebagai obyek dari tujuan pencapaian hasil uji coba model.

Komponen dari kerangka fikir merupakan suatu proses yang akan dilakukan hingga tercapai hasil dari pengembangan yang dilakukan, komponen tersebut terdiri atas ;

1. Komponen Penyelenggara

Penyelenggara adalah lembaga yang telah diakui keberadaannya baik secara organisasi maupun secara hukum dan berfungsi menginisiasi kegiatan yang akan dilakukan, terdiri dari fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan kebutuhan belajar masyarakat, termasuk mengidentifikasi calon warga belajar. Fungsi lainnya adalah mengembangkan kemitraan dengan menghubungkan antara sumber belajar dengan warga belajar, hubungan kemitraan yang di bangun oleh penyelenggara dapat memberi pemecahan masalah terhadap kebutuhan masyarakat/warga belajar, tidak hanya dari sisi keilmuan dan keterampilan, namun juga dari sisi pengembangan wirausaha masyarakat.

2. Komponen Mitra

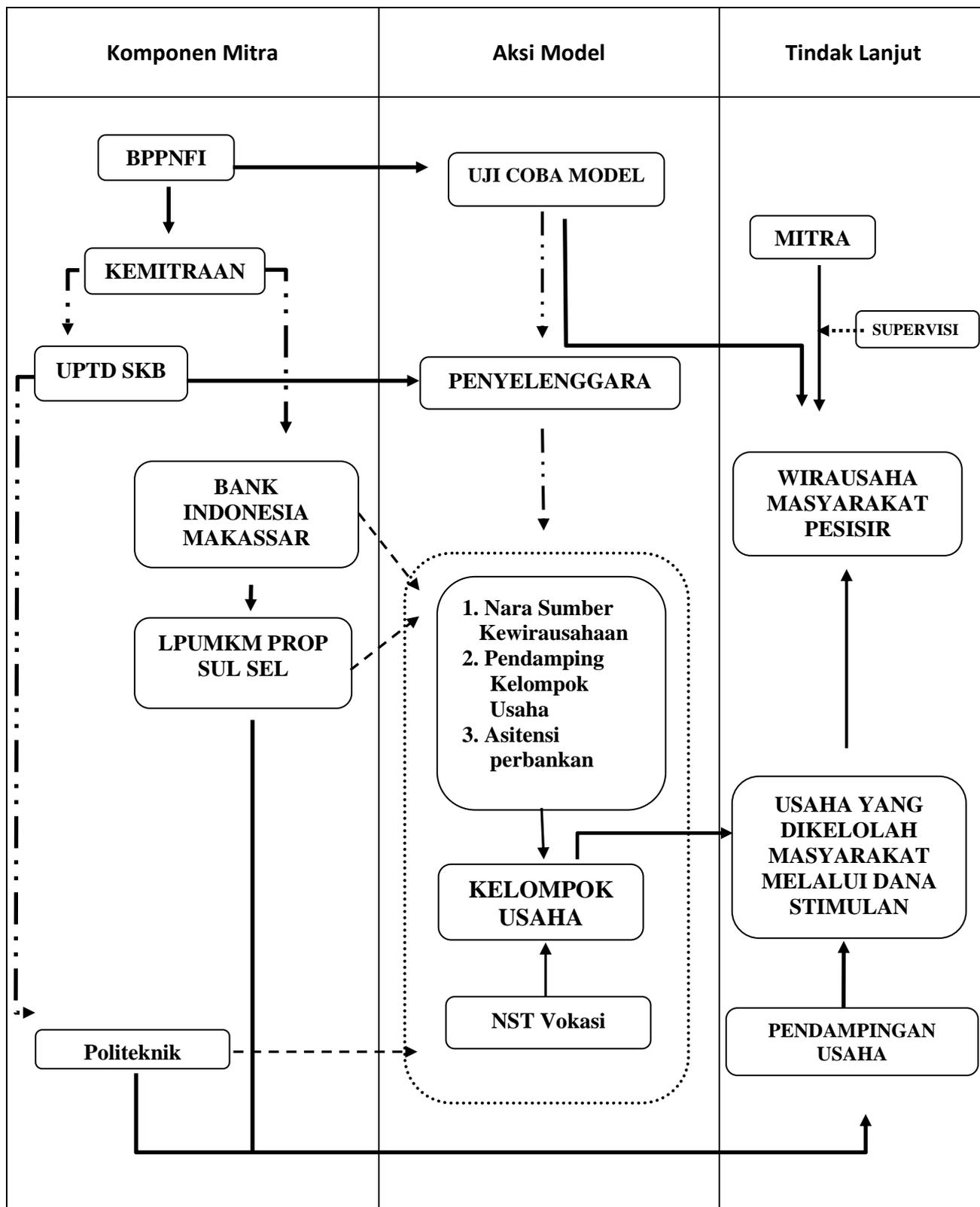
Komponen mitra adalah merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Pengembangan kemitraan dalam kerangka pikir bertujuan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dari pengembangan model, bentuk kemitraan yang dibangun oleh lembaga penyelenggara ada dua; (1) kemitraan dalam memberikan pengetahuan secara teori dan praktek sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan materi Kemitraan, kewirausahaan, keterampilan/vokasi dan pemasaran yang bertujuan mengisi dan

meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap potensi dan sumberdaya yang berada di wilayah mereka dalam mengembangkan wirausaha. (2) Kemitraan dalam membangun motivasi masyarakat melalui pemanfaatan dana stimulan dalam membangun wirausaha masyarakat, pendampingan dalam pemanfaatan dana stimulan, asistensi keterpakaian dana usaha serta pengakuan lembaga mitra lainnya dalam mendukung dan memberikan bantuan serupa dalam pengembagn dan penguatan wirausaha masyarakat.

3. Komponen Dana Stimulan

Pengertian Stimulan sesuatu yg menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja (belajar dsb); pendorong; penggiat; perangsang: Bantuan Stimulan adalah fasilitasi Pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2011).

Pemanfatan dana stimulan melalui pola kemitraan dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada warga belajar dalam penggunaan dan pemanfaatan dana agar tercapai tujuan berupa wirausaha bagi warga belajar dalam bentuk lembaga keuangan, selain itu peran mitra dalam hal ini berfungsi sebagai supervisi dalam melihat perkembangan kelompok wirausaha sehingga dapat mendukung keberlanjutan dari kegiatan warga belajar dengan memberikan bantuan baik tehnik maupun permodalan guna pengembangan dan penguatan wirausaha warga belajar sesuai dengan fungsi dan kemampuan mitra.



B. Kelembagaan/Organisasi

1. Organisasi Pelaksana

Leading sektor dari pelaksanaan uji coba model Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimulan Bagi Masyarakat Pesisir adalah UPTD SKB dan melibatkan unsur-unsur terkait dengan program ini dalam mendukung pencapaian hasil penerapan model yang dilakukan.

UPTD SKB menjalankan dan melaksanakan tugas percontohan pengembangan model melalui pelatihan pendidikan kewirausahaan pola kemitraan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh BPPAUDNI Regional III yang berbasis potensi lokal bagi masyarakat di daerah pesisir. UPTD SKB wajib melibatkan dan/atau bekerjasama dengan Dinas Perikanan, Dinas perdagangan dan Perindustrian, Politeknik, Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (LPUKM), Bank Indonesia Makassar, Lembaga Swadaya Masyarakat (Satuan PNFI dan/atau lembaga yang kompeten) dan kesemuanya disesuaikan dengan pola pemanfaatan dana stimulan dalam pengembangan wirausaha masyarakat di daerah pesisir.

2. Koordinasi Pelaksanaan

Pelaksanaan model Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimulan Bagi Masyarakat Pesisir dilakukan melalui uji coba model dalam bentuk diklat dan pendampingan/asistensi pemanfaatan dana stimulan. Adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan model :

1. Tim Pengembang Model BPPAUDNI Regional III.
2. UPTD SKB pelaksana model sekaligus sebagai tempat uji coba model
3. Bank Indonesia Makassar sebagai NST/Supervisi kewirausahaan serta pemantauan kelompok usaha masyarakat
4. Dinas Perikanan sebagai teknis NST/pendampingan/asistensi vokasi

5. Dinas Perindustrian dan perdagangan NST/pendampingan/asistensi pemasaran produk.
6. Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (LPUMKM) sebagai NST/pendamping/asistensi teknis kewirausahaan serta supervisi lembaga keuangan masyarakat di daerah uji coba.

C. Materi dan Kurikulum

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan diarahkan pada pemenuhan pemahaman dan aplikasi peserta didik tentang kewirausahaan serta bagaimana membangun kemitraan sehingga dapat memperkuat kelompok wirausaha masyarakat yang disesuaikan dengan vokasi dan kebutuhan pasar.

Penyelenggaraan pengembangan model direncanakan selama \pm 8 bulan dengan pemenuhan isi kurikulum \pm 200 jam pelajaran termasuk pola pendampingan, asistensi dan supervisi pasca pelatihan yang melibatkan unsur mitra. Materi yang disiapkan pada Model Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimula Bagi Masyarakat Pesisir diantaranya :

- a. Materi pengembangan vokasi/ keterampilan
 1. Pengolahan hasil perikanan
 2. Diversifikasi Produk olahan
- b. Materi pengembangan kewirausahaan
 1. Prinsip prinsip Kewirausahaan
 2. Manajemen administrasi LKM
 3. Membangun jaringan usaha dan pemasaran
 4. Prinsip prinsip kemitraan
- c. Materi pengembangan Kemitraan
 1. Membuat rencana dan proposal kemitraan
 2. Mengenal dunia permodalan dan perbankan
 3. Manajemen dan evaluasi kemitraan
 4. Promosi dan pemeran produk

5. Membuat laporan kemitraan

Pemenuhan unsur kurikulum dan isi program diarahkan pada konsep aplikatif yang langsung bersentuhan dengan media program, sehingga diakhir pelatihan diarahkan pada unsur pendampingan, asistensi dan supervisi dengan memanfaatkan dana stimulan sesuai dengan arah pelatihan yang telah dilakukan dalam menghasilkan mekanisme unit usaha oleh masing masing peserta didik ke arahemandirian dalam bentuk lembaga keuangan/koperasi yang dibangun dan sekaligus menjadi binaan dari mitra.

D. Proses Pembelajaran

a. Jadwal pembelajaran

Jadwal pembelajaran dibuat guna menentukan kegiatan proses pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan jumlah jam pelajaran dilakukan dengan pelibatan kelompok belajar, sedangkan waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara narasumber/ instruktur, peserta didik dan penyelenggara/ pengelola program.

b. Sistem Pembelajaran/metode pembelajaran

Pengembangan sistem pembelajaran keterampilan pada program Pendidikan Kecakapan Hidup dilakukan dengan pemberian pengetahuan yang dilaksanakan berjenjang dan terstruktur. Pengembangan sistem pembelajaran digali dari potensi lokal melalui hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat.

Pengembangan sistem pembelajaran pada program ini dilakukan dengan tiga bagian pembelajaran yang dikembangkan serta saling keterkaitan dan dapat dilakukan dalam setiap tatap muka, yaitu :

1) Teori

Pemberian teori sesuai dengan pengetahuan dan jenis keterampilan yang dikembangkan dengan penyajian materi pembelajaran berkisar 25-30% yang difokuskan pada pemenuhan pengetahuan secara akademik

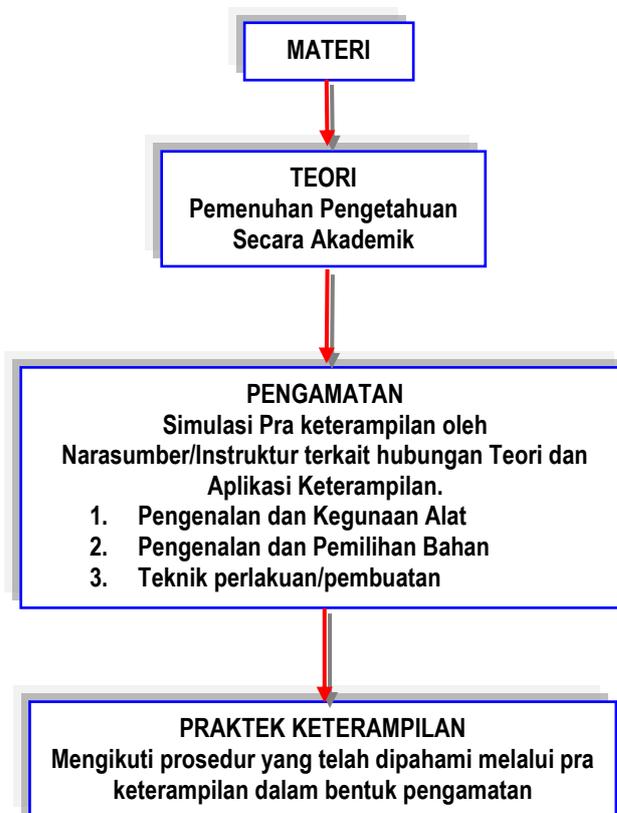
baik secara lisan maupun tertulis, sehingga peserta didik mendapat pemahaman tentang apa yang dipelajari.

2) Pengamatan

Pengamatan berkisar 10-15% bertujuan menghantar para peserta didik dalam memahami dan menganalisa kegiatan keterampilan terkait dengan pengetahuan secara akademik dan secara operasional. Hal ini dilakukan oleh narasumber/instruktur dalam bentuk simulasi sebelum peserta didik melakukan uji coba melalui praktek keterampilan.

3) Praktek Keterampilan

Praktek keterampilan berkisar 60% dan dilakukan setelah melalui tahapan tersebut di atas, dimana peserta didik melakukan proses perlakuan secara mandiri/kelompok guna memberikan keleluasan dalam membuat produk tertentu yang disesuaikan dengan materi keterampilan yang telah disimulasikan oleh narasumber/instruktur.

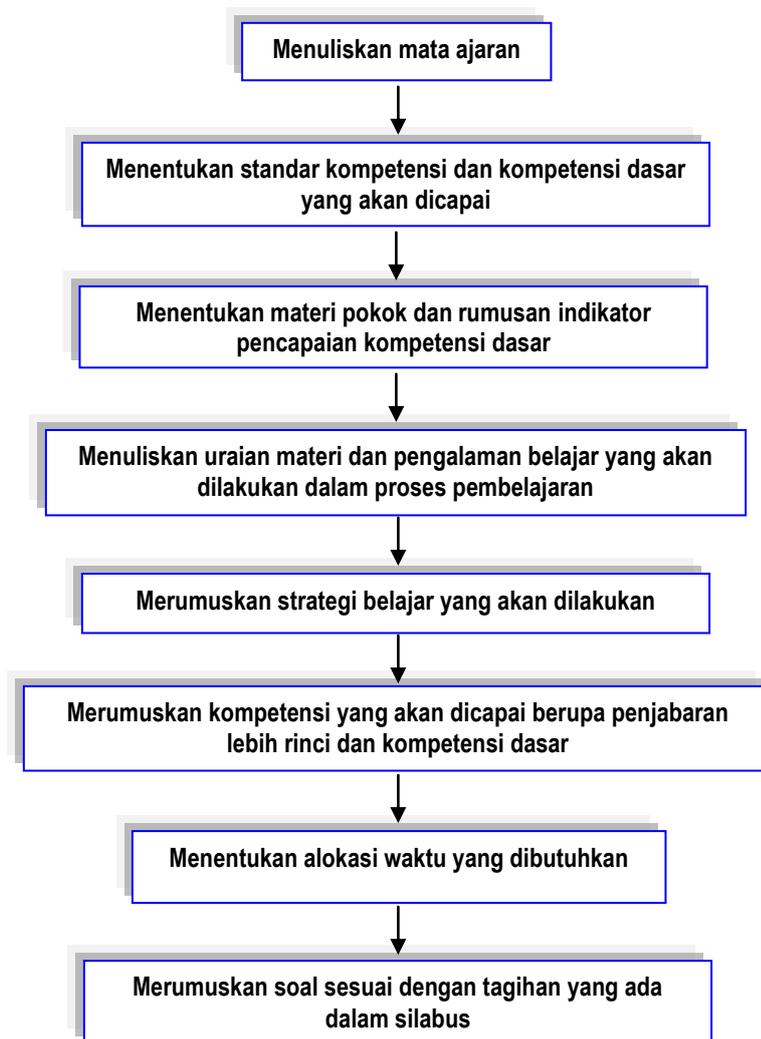


Pendekatan sistem pembelajaran harus bersifat praktis dan fleksibel dimana pengetahuan teoritik bersifat sebagai pengantar pemahaman pelajaran keterampilan. Jadi pendekatan sistem pembelajaran merupakan pendekatan yang bersifat konkrit, beorientasi lapangan dan pola operasional kemandirian. Dan yang terpenting lagi bahwa konseptual pendekatan sistem pembelajaran memuat arah pemandirian dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dalam bidang usaha yang bersanding dengan pembelajaran pengelolaan manajemen usaha.

Pendekatan sistem pembelajaran lebih diarahkan pada kebutuhan peserta didik sebagai pihak yang berproses dalam setiap kegiatan baik dibentuk secara berkelompok maupun secara individu sehingga memudahkan proses pembelajaran, dimana posisi tutor/tenaga pengajar dan NST adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

c. Penyusunan Program Belajar

Program belajar dibuat sesuai dengan ketercapaian kompetensi dasar pendidikan kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh peserta didik. Langkah-langkah dalam membuat program belajar dapat diuraikan sebagai berikut :



E. Peserta didik

Peserta didik direkrut dari kalangan buruh nelayan dan atau keluarga buruh nelayan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar dan atau paket A
2. Telah mampu membaca, menulis dan berhitung
3. Berusia antara 18 sd 35 tahun
4. Berdomisili pada tempat uji coba
5. Memiliki jiwa kewirausahaan
6. Bersedia mengikuti proses pembelajaran sampai selesai

F. Ketenagaan (pendidik dan tenaga kependidikan)

Standar pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan PNF adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

1. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah pengelola/penyelenggara, tehnik, laboran dan sejenisnya yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dalam bentuk pengelolaan manajemen kegiatan, perencanaan kegiatan, penjadwalan kegiatan, pengawasan dan pendampingan kegiatan serta pelaporan hasil kegiatan.

Tenaga kependidikan dalam kegiatan pengembangan model dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan minimal Lulusan SMA;
- b. Mempunyai perhatian dalam peningkatan mutu pendidikan nonformal;
- c. Mempunyai kepedulian dalam pengembangan potensi wilayah pesisir;
- d. Mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup berbasis kelautan dan perikanan ;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

2. Tenaga Pendidik

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai tutor atau instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tutor sebagai agen pembelajaran dalam hal pemberian pengetahuan dan fasilitasi pembelajaran

minimal memiliki *kualifikasi* yang sesuai dengan bahan pembelajaran yang dilakukan, memiliki *kompetensi* sebagai agen pembelajaran dalam penerapan pengetahuan dan aplikasi keterampilan, didukung dengan jasmani dan rohani yang sehat dan stabil serta memiliki kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

a. Pendidik Keterampilan

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat sesuai dengan jenis vokasi yang dikembangkan.
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan vokasi dikembangkan
3. Memiliki jaringan kemitraan vokasi yang dikembangkan dan atau sebagai pelaku usaha vokasi yang dilakukan.
4. Bersedia menjadi tenaga pendidik.

b. Pendidik Wirausaha

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat.
2. Memiliki kompetensi wirausahaan secara teori dan praktek.
3. Memiliki jaringan kemitraan wirausaha secara pribadi dan kelembagaan.
4. Bersedia menjadi tenaga pendidik.

G. Sarana Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus dipersyaratkan minimal ;

1. Ruang Belajar

Ruang belajar minimal terdiri dari satu ruangan praktek dan satu ruangan teori dengan daya tampung ideal sesuai dengan jumlah peserta. Namun dapat dikondisikan dengan lokasi dan keadaan lingkungan peserta didik

dengan pemahaman bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung dan peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Bengkel/Laboratorium Lapangan

- a. Sarana bengkel/laboratorium/lapangan minimal sesuai dengan jumlah peserta didik dan atau jumlah kelompok pembelajaran.
- b. Bahan dan alat tersedia cukup dan dapat digunakan peserta dalam memenuhi keterampilannya sesuai kebutuhan pembelajaran yang dilakukan.
 1. Alat dan bahan paraktek tersedia cukup
 2. Alat dan bahan layak dipergunakan
 3. Alat dan bahan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan
 4. Terdapat buku panduan penggunaan (buku praktek)

H. Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri dari investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh warga belajar untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Standar biaya pengelolaan dalam penyelenggaraan *Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimulan Bagi Masyarakat Pesisir* memiliki standar minimum yang dipersyaratkan sebesar Rp. 1,000,000/orang, dengan rincian ; biaya personal 50%, biaya operasional 40% dan manajemen penyelenggaraan 10%

I. Evaluasi dan indikator keberhasilan

1. Evaluasi / Penilaian

Evaluasi pada dasarnya bertujuan guna mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik selama mengikuti program pembelajaran sehingga dapat mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap apa yang telah pelajarnya, selain sebagai bagian alat ukur indikator hasil pencapaian program melalui kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik secara pengetahuan maupun secara aplikasi keterampilan. Evaluasi atau penilaian dalam pengembangan model ini dilakukan dengan mengacu pada 2 (dua) tahapan uji coba model yang meliputi evaluasi atau penilaian pada tahapan pendidikan dan pelatihan serta tahap analisis dan asistensi, sedang pola pendampingan dilakukan dengan supervisi oleh mitra dalam pengembangan model ini.

a. Evaluasi Pendidikan dan Latihan

Evaluasi atau Penilaian pada pelaksanaan pendidikan dan latihan dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pendidikan dan latihan untuk mengukur kemampuan pemahaman teori dan simulasi keterampilan, standar penilaian mencakup ;

- a. Kemampuan teori
- b. Kemampuan pengamatan
- c. Kemampuan keterampilan
- d. keaktifan mengikuti materi
- e. Keaktifan melakukan tanya jawab
- f. Kemandirian belajar

b. Evaluasi analisis dan asistensi

Evaluasi atau penilaian dalam tahapan kedua adalah analisis dan asistensi, dimana peserta didik diberikan beban belajar melalui aplikasi lapangan setelah melalui tahapan diklat, aplikasi lapangan menggunakan pola perencanaan usaha melalui pembuatan proposal secara sederhana baik

secara sendiri sendiri maupun dalam bentuk kelompok. Analisis adalah kegiatan peserta didik dalam membaca peluang burusaha dan menuangkannya dalam bentuk proposal sederhana, sedangkan kegiatan asistensi adalah penilaian proposal yang dilakukan oleh tim pendamping atau mitra guna melihat perkembangan pemahaman peserta didik dalam merencanakan usaha, penilaian ini di dasarkan pada aspek ;

- a. Kemampuan motivasi
- b. Kemampuan bekerja tim
- c. Kemampuan bersosialisasi
- d. Kemampuan berkomunikasi

c. Pendampingan melalui pola supervisi bertujuan guna melihat perkembangan secara keseluruhan dari hasil pelatihan yang telah dikembangkan menjadi usaha, pola supervisi diharapkan dapat memberikan masukan pada tiap komponen mitra yang terlibat sebagai bahan dalam memberikan pendampingan lebih intens serta penilaian dalam memberikan bantuan secara tehnik maupun materi dalam memperkuat usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik.

2. Indikator Keberhasilan

Model Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimulan Bagi Masyarakat Pesisir bertujuan guna menumbuh kembangkan potensi masyarakat pesisir terkhusus bagi buruh nelayan atau keluarga buruh nelayan dalam mengangkat taraf hidupnya serta memperbaiki tataran ekonomi mereka ke yang lebih baik. Pola pengembangan model yang dilakukan ini adalah memberikan bekal keterampilan kepada peserta didik melalui pelatihan dan pendampingan secara kemitraan dalam mengembangkan wirausaha sesuai dengan potensi disekitar lingkungan mereka, indikator dari pengembangan model ini mengacu pada ;

a. Perilaku

Mengubah perilaku peserta didik dengan menumbuhkan motivasi agar mau terlibat dalam pembelajaran. Perubahan perilaku ini dapat dilihat melalui ketertarikan peserta didik dari yang tadinya enggan mengikuti pembelajaran menjadi ingin terlibat langsung dalam pembelajaran.

Hal tersebut dapat dilakukan bila pembelajaran yang dilakukan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menilai aspek berdasarkan keikutsertaan peserta didik terlibat langsung dalam proses belajar, menghargai waktu, terlibat dalam pola kerja sama dalam kelompok serta perubahan sikap yang mandiri.

b. Psikomotorik

Meningkatnya kecakapan bekerja dan berusaha yang dilakukan oleh peserta didik baik secara individu maupun berkelompok dalam melakukan aktifitas kegiatan keterampilan. Ketercapaian keberhasilan psikomotorik dalam bentuk keterampilan dapat dilihat dengan tumbuhnya motivasi dan inovasi, bekerja dengan hasil tepat waktu dan menerapkan hasil produk yang mempunyai kualitas serta ketercapaian mutu yang baik dilakukan oleh peserta didik dalam membuat dan mengembangkan hasil keterampilan yang dilakukan.

Penguasaan hasil pendidikan keterampilan diharapkan menjadi bekal dalam proses kemandirian usaha guna mendapatkan outcome bagi peningkatan ekonomi peserta didik.

c. Kewirausahaan.

Hasil yang menjadi produk akhir dalam pendidikan keterampilan adalah telah terbentuknya usaha secara mandiri atau kelompok bagi peserta didik namun dalam tataran lembaga yang telah dibentuk guna mengkoordinir pemanfaatan dana stimulan, sehingga pendidikan keterampilan yang telah diikuti dapat menjadi modal dalam mendapatkan hasil sehingga menjadi penopang ekonomi peserta didik.

d. Output

Luaran yang diharapkan dari pengembangan model bagi masyarakat pesisir adalah terbentuknya sikap mandiri, berusaha dan bekerja sesuai dengan jenis keterampilan yang berbasis kebutuhan pasar serta membangun jiwa wirausaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengembangan model dalam pemanfaatan dana stimulan melalui pola kemitraan berbasis kawasan pesisir dilaksanakan kurang lebih 8 bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2012. Lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan model di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

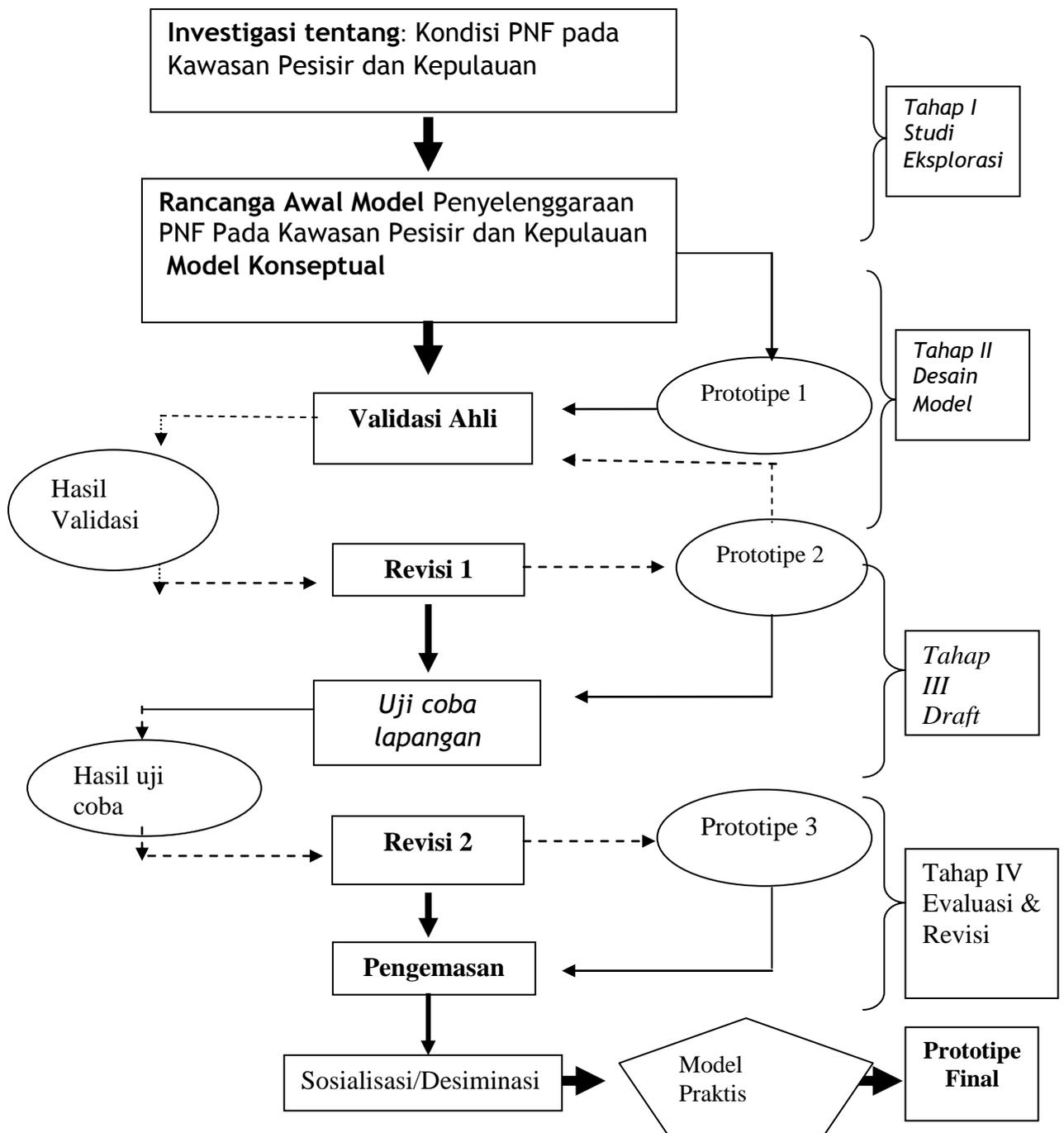
B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan menggunakan Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D). Metode Penelitian dan Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu (Sugiono; 2009).

Prosedur pengembangan dibagi atas 5 tahap, yaitu:

1. Tahap investigasi awal, kegiatan berupa studi eksplorasi untuk menggali permasalahan, potensi sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan model.
2. Tahap perancangan, meliputi kegiatan merancang desain model
3. Tahap realisasi/konstruksi, merupakan kegiatan validasi teoritik untuk menghasilkan draft model konseptual.
4. Tahap evaluasi, dan revisi, meliputi kegiatan pengujian, evaluasi dan revisi model operasional. Fokus pada tahap ini adalah memvalidasi dan uji coba lapangan dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan revisi yang akan menghasilkan prototipe model.
5. Tahap implementasi dan desiminasi, bertujuan untuk melihat kualitas model.

Seluruh kegiatan proses pengembangan model yang telah diuraikan tersebut di atas dapat digambarkan dalam diagram alur berikut ini:



C. Uji Coba Model

1. Validasi Model

Validasi model dilakukan melalui dua tahap; *pertama* validasi konseptual oleh para ahli dan praktisi melalui seminar/FGD, *kedua* melalui uji coba lapangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (quasi experiment)

2. Sumber Data
 - a. Pendamping Lapangan
 - b. Instruktur
 - c. Pengelola
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*).
 - b. Teknik observasi.
 - c. Teknik Dokumentasi.
 - d. Angket
 - e. FGD

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, dianalisis melalui gabungan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi. Sedangkan analisis kuantitatif dibuat dalam bentuk tabel frekuensi, prosentase.

D. Analisis dan Revisi

1. Analisis

Menganalisis temuan-temuan selama uji coba selanjutnya dikaji kelayakan produk keseluruhan maupun bagian-bagian produk. Kajian diarahkan untuk perbaikan model berdasarkan hasil pengembangan dan menghubungkan dengan pengalaman lapangan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar/FGD dengan melibatkan akademis dan praktisi.

2. Revisi

Memperbaiki produk yang dihasilkan sesuai dengan hasil analisis dan temuan-temuan lapangan.

BAB V

PROSES PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI

A. Proses Pelaksanaan

1. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam pengembangan model dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Kegiatan ini dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengembangan model penyelenggaraan pendidikan nonformal berbasis kawasan pesisir dan kepulauan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya lokal dan regional. Tujuan pelaksanaan studi eksplorasi adalah:

- a. Memperoleh pemahaman tentang landasan teoritis dan konsep landasan yuridis yang berkaitan dengan model penyelenggaraan program PNF berbasis kawasan pesisir.
- b. Memperoleh gambaran tentang potensi sumberdaya lokal dan regional yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal di wilayah pesisir.
- c. Memperoleh gambaran tentang kebutuhan belajar masyarakat pesisir dan kepulauan melalui pendidikan nonformal;
- d. Memperoleh data dan informasi pendukung lainnya yang relevan dengan model pendidikan nonformal berbasis kawasan pesisir.

Kegiatan studi eksplorasi dilakukan dengan mengambil secara acak dua daerah di wilayah kerja BPPAUDNI Regional III yaitu Kabupaten Barru dan Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan).

Hasil studi eksplorasi menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pesisir masih tertinggal dalam berbagai aspek antara lain aspek pendidikan yang masih rendah, angka putus sekolah masih tinggi, tingkat setengah

pengangguran masih tinggi. Masyarakat masih cenderung mempertahankan tradisi sebagai nelayan tangkap dengan sistim yang tradisional dan sangat tergantung pada tengkulak atau *punggawa*. Sementara disisi lain potensi sumberdaya lokal sangat mendukung untuk dikembangkan salah satu diantaranya adalah pengolahan hasil laut.

Hasil studi eksplorasi (lihat laporan hasil studi eksplorasi) diseminarkan untuk memperoleh masukan-masukan dari praktisi dan akademisi. Dalam seminar tersebut dibahas tentang permasalahan-permasalahan pendidikan pada umumnya, potensi sumber daya dan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah pesisir dan kepulauan. Berdasarkan hasil seminar diperoleh kesimpulan bahwa judul yang cocok untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan adalah *Model Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimulan Bagi Masyarakat Pesisir*.

2. Penyusunan Draft

Langkah kedua yang dilakukan dalam penelitian pengembangan adalah menyusun draft model dan kelengkapannya untuk diujicobakan. Draft model disusun berdasarkan kajian hasil studi eksplorasi. Hasil dari penyusunan bahan uji coba diberi nama draft I. Produk yang dihasilkan adalah:

a. Draft Model

Draft model berisi tentang kerangka model dan komponen-komponen pengembangan model.

b. Bahan Ajar

Bahan ajar memuat tentang bagaimana pengolahan rumput laut dan bagaimana berwirausaha.

c. Kurikulum

Perencanaan yang dilakukan dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal bidang vokasi pengolahan rumput laut dengan jumlah jam pelajaran 200 jam pelajaran dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik.

- a. Materi pengembangan vokasi/ keterampilan
 - 1. Pengolahan hasil perikanan
 - 2. Diversifikasi Produk olahan
- b. Materi pengembangan kewirausahaan
 - 1. Prinsip prinsip Kewirausahaan
 - 2. Manajemen administrasi LKM
 - 3. Membangun jaringan usaha dan pemasaran
 - 4. Prinsip prinsip kemitraan
- c. Materi pengembangan Kemitraan
 - 1. Membuat rencana dan proposal kemitraan
 - 2. Mengenal dunia permodalan dan perbankan
 - 3. Manajemen dan evaluasi kemitraan
 - 4. Promosi dan pemeran produk
 - 5. Membuat laporan kemitraan

Langkah selanjutnya setelah penyusunan draft dan kelengkapan model adalah seminar dengan mengundang praktisi dan akademisi untuk memberikan masukan sekaligus memvalidasi draft model dan kelengkapannya untuk menghasilkan draft II.

3. Uji Coba

Kegiatan uji coba pengembangan model ini dilaksanakan di kabupaten Barru, tim pengembangan tidak memiliki banyak waktu untuk mengamati terus perkembangan penerapan model. Oleh karena itu pada lokasi uji coba, tim pengembang dibantu oleh dua pembantu lapangan yang direkrut dari pamong belajar SKB. Tugas pembantu lapangan yaitu mencatat perkembangan pelaksanaan uji coba, permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan upaya mengatasi. Catatan lapangan merupakan bahan informasi yang selanjutnya diolah oleh tim pengembangan.

a. Orientasi Teknis

Kegiatan orientasi teknis pengembangan model dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada semua unsur yang terlibat dalam pengembangan model. Materi yang diorientasikan meliputi pemahaman tentang konsep pengembangan model dan bagaimana penerapannya, mulai dari rekrutmen peserta didik, pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan pemandirian kelompok. Dalam kegiatan orientasi dihadirkan pemerintah setempat sekaligus sosialisasi pengembangan model.

b. Pelatihan

Setelah kegiatan orientasi dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan. Jumlah jam keseluruhan sebanyak 200 jam @45 menit, masing-masing untuk diklat 48 jam dan proses assistensin dampingan 152 jam dengan pembagian persentase penyajian materi 30% teori dan 70% praktik.

c. Pemandirian kelompok

Pemandirian kelompok dilakukan setelah seluruh proses pelatihan dilaksanakan. Jumlah warga belajar pada labsite uji coba sebanyak 10 orang/kelompok usaha, setiap peserta diberi pengetahuan untuk mengakses modal. Keterampilan yang telah diperoleh berupa pengelolaan hasil laut merupakan modal dalam menjalankan usaha yang akan dilakukan, dimana kelompok ini diharapkan bekerja bersama sama dalam mengembangkan kelompok usahanya melalui ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil laut. Kelompok ini diperlakukan sesuai dengan arah pengembangan yaitu memberikan motivasi dan pendampingan terhadap pertumbuhan kelompok usaha yang diharapkan nantinya dapat melakukan kemitraan dalam membesarkan usahanya.

4. Monitoring

Monitoring dilakukan sebanyak dua kali, kegiatan ini dilakukan oleh tim pengembang untuk mengetahui perkembangan penerapan model. Catatan-catatan lapangan yang dibuat oleh pembantu lapangan dilakukan klarifikasi di lapangan untuk melihat kelemahan-kelemahan penerapan model.

Tabel 2
Temuan Hasil Monitoring

No	Komponen	Temuan	Rekomendasi
1	Warga Belajar	Rekrutmen calon warga belajar masih ada yang tidak sesuai kriteria	Mengganti calon warga belajar yang tidak sesuai dengan kriteria
2	Instruktur	Materi yang disampaikan masih belum mengacu pada panduan kurikulum.	Menyarankan kepada instruktur agar berpedoman pada silabus yang ada, apabila ada kekurangan menjadi rekomendasi untuk perbaikan.
3	Tempat Belajar	Kategori layak dan berada dibalai desa	
4	Metode Belajar	Metode belajar sudah sesuai dengan konsep belajar orang dewasa.	
5	Bahan Ajar	Bahan ajar yang digunakan sudah dapat dipahami oleh peserta didik namun materi masih perlu penyederhanaan.	

6	Kurikulum	Ada beberapa sub pokok bahasan yang tumpang tindih	Menggabungkan sub pokok bahasan yang tumpang tindih.
7	Pendanaan	Anggaran untuk penyelenggaraan kursus masih sangat minim terutama untuk pembelian alat/bahan praktik dan pemandirian kelompok usaha	Menyesuaikan saja anggaran yang ada sambil menunggu dana shering dari pemerintah setempat.
8	Pemandirian kelompok	Dana terbatas untuk pemandirian kelompok	
9	Kemitraan	Peran instansi terkait masih kurang dalam hal shering anggaran pemandirian kelompok.	Mendiskusikan dengan instansi terkait agar mendukung melalui shering pendanaan.

B. Karakteristik Model

1. Kelembagaan

Pelaksanaan uji coba model pendidikan kewirausahaan pola kemitraan melalui pemanfaatan dana stimulan bagi masyarakat pesisir melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh UPTD SKB dengan melibatkan unsur-unsur terkait dengan program ini dalam mendukung model penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan bagi buruh/nelayan.

UPTD SKB kota/kabupaten dalam menjalankan dan melaksanakan program disesuaikan dengan jenis vokasi berdasarkan potensi lokal dari daerah uji coba yang mempunyai peluang usaha untuk dikembangkan sesuai dengan hasil analisis tempat uji coba dan diarahkan terbentuknya kelompok kewirausahaan pada daerah pengembangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan UPTD SKB melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait yang didasarkan pada ;

1. Pendataan sasaran dan jenis vokasi yang akan dilaksanakan.
 - a. SKB, Pemerintah setempat dan Tokoh masyarakat serta LSM.
2. Pengembangan kurikulum kewirausahaan.
 - a. BPPAUDNI Regional III
 - b. Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil mikro dan Menengah (LPUMKM).
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
 - a. SKB Sebagai tempat uji coba (percontohan) dan penyelenggara.
 - b. LPUMKM /BI/ Praktisi sebagai pengajar kewirausahaan.
 - c. Politeknik Perikanan sebagai pengajar keterampilan pengolahan hasil laut
4. Pembinaan dan pendampingan lulusan pada saat pasca pelatihan melalui kelompok usaha.
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar dan atau lembaga Non Formal lainnya pendamping dalam pelaksanaan usaha yang bertindak sebagai tim assistensi pemandirian usaha.
 - b. Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil mikro dan Menengah (LPUMKM) pendamping kewirausahaan dan assistensi pembukuan kelompok wirausaha yang terbentuk.
 - c. Bank Indonesia Makassar sebagai pendamping dan mitra dalam melihat perkembangan kelompok usaha yang nantinya berfungsi sebagai pendampingan penguatan kelompok.
 - d. Politeknik pendamping dalam pengembangan keterampilan dan akses dalam pemberian bantuan teknis dan materi perikanan.

2. Peserta Didik

Peserta didik direkrut dari kalangan keluarga buruh nelayan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar dan atau paket A
2. Telah mampu membaca, menulis dan berhitung
3. Berusia antara 18 sd 45 tahun
4. Berdomisili pada tempat uji coba
5. Memiliki jiwa kewirausahaan
6. Bersedia mengikuti proses pembelajaran sampai selesai

3. Pendidik

Standar pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan PNF adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan dengan standar minimal ;

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat sesuai dengan jenis vokasi yang dikembangkan.
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan vokas dikembangkan
3. Memiliki jaringan kemitraan vokasi yang dikembangkan dan atau sebagai pelaku usaha vokasi yang dilakukan.
4. Bersedia menjadi tenaga pendidik.

Hasil uji coba yang telah dilakukan merangkum kriteria dari tenaga pendidik yang di libatkan antara lain ;

a. Bidang Vokasi Pengolahan Hasil Perikanan

1. Kualifikasi Sarjana perikanan bidang pengolahan hasil perikanan
2. Kompetensi memahami dan mampu melakukan kegiatan pengolahan

hasil perikanan dalam bentuk teori dan praktek.

3. Berasal dari unsur perguruan tinggi (Politeknik) serta telah mengembangkan usaha pengolahan pada beberapa daerah.
4. Bersedia melakukan pendampingan teknis terhadap usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Bidang Ilmu Kewirausahaan

1. Kualifikasi Sarjana Ekonomi dan Sarjana Perikanan (manajemen)
2. Kompetensi memahami dan mampu memberikan motivasi wirausaha.
3. Berasal dari unsur Perbankan (BI) dan unsur swasta (LPUMKM) yang banyak terlibat dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat.
4. Bersedia melakukan pendampingan dan membangun kemitraan dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat.

4. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dengan mengacu pada kurikulum muatan lokal sesuai dengan jenis vokasi yang dikembangkan, secara garis besarnya dikembangkan bahan ajar tentang pengolahan hasil laut (sesuai vokasi) dan bahan ajar kewirausahaan serta panduan penyusunan proposal usaha secara sederhana. Adapun bahan ajar yang menjadi acuan dalam penerapan pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Pengolahan hasil perikanan
2. Diversifikasi Produk olahan
3. Prinsip prinsip Kewirausahaan
4. Manajemen administrasi LKM
5. Membangun jaringan usaha dan pemasaran
6. Prinsip prinsip kemitraan
7. Membuat rencana dan proposal kemitraan
8. Mengenal dunia permodalan dan perbankan
9. Manajemen dan evaluasi kemitraan

10. Promosi dan pemeran produk

11. Membuat laporan kemitraan

5. Metode Belajar

a. Curah gagasan

Curah gagasan adalah situasi pemecahan masalah dimana peserta disajikan suatu masalah dan diminta untuk menyampaikan setiap gagasan yang mereka pikirkan, tidak jadi soal betapapun aneh atau gila-gilanya gagasan itu. Semua gagasan dihimpun dan dicatat, tanpa evaluasi, sebelum didiskusikan. Pengumpulan gagasan berlangsung selama 5 sampai 15 menit.

b. Study Kasus

Studi kasus adalah peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara lisan berkenaan dengan situasi realistik. Dalam studi kasus dicakupkan rincian secukupnya agar peserta dapat menganalisis masalah dan mengajukan solusi yang mungkin. Dalam banyak kasus, tidak ada satu jawaban yang benar. Studi kasus seyogianya sedapat mungkin mewakili kejadian yang sesungguhnya, baik dalam hal sifat isi dan cara menyajikan dan menyelesaikannya. Meskipun pekerjaan atas kasus itu dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok. Metode ini harus diakhiri dengan diskusi hasil yang diperoleh.

c. Demonstrasi (demonstration)

Metode yang menunjukkan bagaimana cara kerja atau melakukan sesuatu. Metode ini ditetapkan untuk mengilustrasikan atau memperjelas gagasan, proses, atau hubungan. Peran peserta adalah mengamati dan tidak terlibat secara langsung. Metode ini seringkali disertai dengan meminta langsung peserta mempraktekkan hal-hal yang didemonstrasikan serta menerima balikan.

d. Diskusi (discussion)

Proses eksplorasi topik atau masalah tertentu dalam kelompok. Metode ini efektif untuk digunakan dalam kelompok beranggotakan 10-25 orang. Metode ini sering dipasangkan dengan ceramah atau metode nonpartisipatif lainnya. Dalam diskusi, fasilitator bertindak sebagai katalis dan moderator, mengajukan pertanyaan, mencatat dan atau mengulang tanggapan peserta, dan umumnya membimbing peserta ke arah yang tepat.

e. Ceramah (lecture)

Presentasi lisan yang disampaikan seorang nara sumber kepada sekelompok peserta. Karena penyampaian itu langsung satu arah dan peserta hanya mendengarkan, maka cara ini perlu ditingkatkan dengan alat bantu audiovisual dan digabungkan dengan metode yang lebih aktif (misalnya diskusi atau latihan). Ceramah dapat diberikan kepada sekelompok besar peserta dan waktunya juga dapat tidak terbatas. Namun, yang lebih efektif adalah ceramah singkat sekitar 15 sampai 30 menit.

f. Kelompok Kerja (Work Group)

Dengan metode ini, tiga sampai delapan peserta bekerja sama melaksanakan suatu tugas untuk menghasilkan keluaran tertentu (misalnya saran ,solusi masalah). Tujuannya biasanya adalah menerapkan hasil belajar untuk memecahkan masalah. Metode ini seharusnya tidak digunakan untuk mengenal bahan baru.

6. Tempat

Tempat merupakan lokasi berlangsungnya aktivitas pembelajaran secara teori maupun praktek yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan penerapan model dalam suatu wilayah/daerah tertentu. Terkait dengan pengembangan model *Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan melalui pemanfaatan Dana Stimulan Bagi masyarakat pesisir*, maka tempat yang dimaksudkan disini adalah daerah pesisir dimana calon warga belajar

bertempat tinggal dan melakukan aktifitasnya sehari-hari, dan ketersediaan lahan dalam pengembangan keterampilan masyarakat pesisir dalam bentuk pengolahan hasil perikanan (pengolahan rumput laut).

Pengembangan pendidikan kewirausahaan melalui keterampilan bagi buruh/nelayan dan atau keluarganya dilakukan dengan pengisian pembelajaran secara teori dalam bentuk kelas yang telah tersedia pada tempat pelaksanaan uji coba berupa ruang/balai pertemuan desa, kelengkapan berupa bangku, papan tulis dengan kapasitas ruang pembelajaran yang dapat menampung warga belajar dalam sekali pertemuan, sedangkan pada bagian praktek/penerapan keterampilan, dilakukan uji coba pembauatan produk olahan rumput laut.

7. Jadwal Belajar

Jadwal pembelajaran dibuat guna menentukan kegiatan pembelajaran keterampilan, sehingga dalam menentukan jumlah jam pelajaran dilakukan dengan melibatkan penyelenggara, pendidik dan tim pengembang. Sedangkan waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara narasumber/instruktur, peserta didik dan penyelenggara/pengelola program. Hasil penentuan kegiatan dan jadwal belajar yang dilakukan melalui identifikasi kebutuhan belajar, disepakati dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan pola 48 jam pembelajaran selama 6 hari dengan pendalaman pada materi pengolahan dan kewirausahaan serta penguatan kelompok wirausaha.

Penerapan uji coba model yang disepakati dilakukan dalam bentuk diklat, hal ini sesuai hasil studi eksplorasi serta hasil orientasi pelaksanaan dengan mengacu, bahwa keterampilan yang akan diterapkan telah dipahami oleh sebahagian besar calon peserta didik, namun kendala yang dihadapi dalam pengembangan keterampilan adalah dari segi pengembangan usaha, pemahaman terhadap perhitungan untung rugi suatu usaha, permainan terhadap hasil usaha yang dilakukan (Pasar) serta pengembangan usaha

berikutnya, namun tidak meninggalkan unsur keterampilan itu sendiri dengan melakukan identifikasi yg sering menghambat usaha yang dilakukan. Dasar ini yang menjadi acuan dalam penyusunan jadwal dan kegiatan belajar yang didasarkan pada kurikulum yang dibutuhkan oleh peserta didik.

Tahapan setelah dilakukan diklat adalah kesepakatan pembentukan kelompok usaha dalam pemanfaatan dana stimulan dengan tujuan untuk pengembangan usaha yang diperuntukkan secara kelompok, pemanfaatan dana stimulan ini melalui aturan dan kesepakatan dalam kelompok untuk mengatur mekanisme pemanfaatan dana lebih diarahkan pada pengembangan dan pembinaan secara kelembagaan dengan menganut pada aturan-aturan yang disepakati bersama serta memberikan kekuatan secara kelembagaan agar usaha dapat berkembang melalui pemanfaatan dana bantuan yang ada sekaligus sebagai jembatan dalam memperoleh bantuan dari pihak lain dan atau pun perbankan, selanjutnya setelah tahapan ini dilakukan maka dilakukanlah pendampingan kepada kelompok yang telah terbentuk.

8. Sarana Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan harus dipersyaratkan minimal ;

a. Ruang Belajar

Ruang belajar minimal terdiri dari satu ruangan praktek dan satu ruangan teori dengan daya tampung ideal sesuai dengan jumlah peserta. Namun dapat dikondisikan dengan lokasi dan keadaan lingkungan peserta didik dengan pemahaman bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung dan peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kegiatan uji coba yang dilakukan dalam pengembangan pembelajaran dilaksanakan dan bertempat di Balai Desa Tanjung Butung, Kecamatan Tanete Rilau dengan memfungsikan ruang pertemuan yang ada sebagai tempat pembelajaran, sebagai kelayakan disiapkan papan tulis, LCD, kursi dan meja.

b. Bengkel/Laboratorium Lapangan

1. Sarana bengkel/laboratorium/lapangan minimal sesuai dengan jumlah peserta didik dan atau jumlah kelompok pembelajaran.
2. Bahan dan alat telah tersedia dan dapat digunakan peserta dalam memenuhi keterampilannya sesuai kebutuhan pembelajaran yang dilakukan.
 - a. Alat dan bahan paraktek tersedia cukup
 - b. Alat dan bahan layak dipergunakan
 - c. Alat dan bahan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan
 - d. Terdapat buku panduan penggunaan (buku praktek)

9. Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh warga belajar untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Standar biaya pengelolaan dalam penyelenggaraan *Pendidikan Kewirausahaan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Dana Stimulan Bagi Masyarakat Pesisir* memiliki standar minimum yang dipersyaratkan sebesar Rp. 1,000,000/orang, dengan rincian ; biaya personal 50%, biaya operasional 40% dan manajemen penyelenggaraan 10% yang digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana praktek yang terdiri pembelian alat dan bahan (investasi kelompok) serta biaya personal peserta ditunjang dengan biaya operasional meliputi honor/transport tenaga pendidik dan kependidikan serta ATK peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.

10. Analisis dan Asistensi

- a. Penugasan yang dilakukan kepada peserta didik setelah melalui proses pembelajaran berakhir, dengan memberikan studi kelayakan secara sederhana untuk diisi sesuai dengan analisis potensi dan usaha yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan aplikasi keterampilan manajemen kepada peserta didik dalam membuat proposal usaha dan memprediksi tingkat keberhasilan usaha yang akan dilakukan.

Waktu yang diberikan dalam proses analisis disepakati bersama dengan peserta didik dan minimal 1 minggu. Proses ini dilakukan guna melihat tingkat pemahaman peserta didik terhadap apa yang telah dipelajari dan dipahami dalam penyusunan perencanaan usaha.

- b. Penilaian dan asistensi hasil dari penugasan yang diberikan kepada peserta didik dimaksudkan guna melihat kemampuan peserta didik dalam pembuatan proposal secara sederhana sebelum memulai usaha, asistensi sendiri bertujuan untuk memberikan bimbingan jika sekiranya terdapat kekeliruan untuk diperbaiki sebelum stimulan usaha dimanfaatkan.

setelah analisis dipelajari oleh tim pendamping / pengurus kelompok, maka tahapan berikutnya adalah menyuntikkan stimulan usaha guna

dimanfaatkan sesuai dengan proposal yang diajukan, dengan berdasarkan pada kebenaran data isi proposal usaha serta penilaian dari keseriusan usaha yang akan dijalankan oleh kelompok usaha yang telah terbentuk. Pemanfaatan stimulan usaha yang telah disalurkan, selanjutnya dilakukan pendampingan. Indikator keberhasilan unit usaha yang didampingi didasarkan pada berkembangnya usaha melalui tanggung jawab ketua kelompok, tersentuhnya semua komponen yang ada dalam kelompok serta berkembangnya usaha-usaha mandiri oleh anggota kelompok.

C. Pendampingan, Pembinaan dan Kemitraan

Pendampingan sendiri bermakna bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan guna bantuan dalam rangka mempertahankan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan. Fungsi pembinaan sendiri merupakan kegiatan yang bermakna memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam kurung masa tertentu sehingga kegiatan yang telah dilakukan dapat mencapai hasil yang baik, pembinaan ini pula dapat berperan dalam memberikan motivasi bagi kelompok yang dibina. Pembinaan dapat dilakukan oleh unsur-unsur yang

terkait dengan kegiatan, sehingga terjalin kedekatan emosional antar masyarakat yang dibina dengan unsur Pembina, dalam hal ini unsur pembina dapat berasal dari instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kerjasama (kemitraan) yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

1. Pembinaan

a. Sanggar Kegiatan Belajar

1. Sebagai Unit Percontohan Program

Mengembangkan unit-unit percontohan pembelajaran yang ada dimasyarakat melalui fasilitasi kebutuhan masyarakat dengan sumber belajar yang sesuai.

2. Melakukan control berkala terhadap kelompok-kelompok binaan yang terkait dengan program yang dilakukan, sehingga dapat memberikan pemecahan masalah terhadap apa yang dihadapi oleh kelompok binaan dalam rangka penguatan Lembaga Keuangan kelompok-kelompok binaan.

3. Melakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat yang kompeten dalam rangka pendampingan kelompok.

4. Melakukan pembinaan terhadap lembaga keuang kelompok yang telah dibentuk bersama-sama.

2. Pendampingan dan Kemitraan

a. Politeknik

1. Memberikan bantuan tehnis pengolahan dan memfasilitasi Pengembangan produk olahan yang telah dilakukan.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Memberikan bantuan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan masyarakat yang meliputi, survey potensi, pendataan calon warga belajar bersama dengan SKB, penyiapan sumber belajar dan pembentukan kelompok wirausahaan serta menghubungkan hasil kewirausahaan dengan pasar.
2. Bertindak sebagai motivator dalam kelompok yang bertujuan memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi guna menjaga keharmonisan dalam kelompok. Serta secara rutin melakukan diskusi-diskusi dalam pengembangan dan penguatan kelompok usaha.
3. LSM juga merupakan bagian dari kesepakatan dari instansi terkait dalam rangka melakukan kegiatan pendampingan terhadap kelompok yang telah dibentuk.

c. Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Melakukan pendampingan terhadap hasil kegiatan belajar kewirausahaan dalam bentuk aplikasi lapangan terhadap keterampilan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
2. Melakukan pendampingan terhadap pengajuan proposal dalam pengembangan usaha yang dilakukan setelah kegiatan selesai dalam memperkuat unit usaha masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dikembangkan, serta mamfasilitasi keinginan kelompok dalam mengakses prekreditan keperbankan.

3. Melakukan pendampingan dalam rangka penguataan unit usaha masyarakat melalui promosi dan pameran.
4. LPUMKM merupakan lembaga yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia Makasar dan Dinas Koperasi dalam rangka melakukan pendampingan unit-unit usaha mikro kecil dan menengah yang di kelola oleh masyarakat.

D. Pencapaian Hasil

1. Kuantitatif
 - a. Terlatihnya sebanyak 10 orang warga belajar yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan pengolahan hasil laut;
 - b. Adanya model, bahan ajar, dan kurikulum pendidikan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan bagi buruh nelayan dengan vokasi pengolahan hasil laut;
2. Kualitatif
 - a. Adanya perubahan pola pikir masyarakat dan keluarga mereka dari buruh nelayan tangkap ke kegiatan pengolahan hasil perikanan;

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil validasi teoritik yang dilakukan bersama dengan praktisi dan akademisi serta hasil validasi empirik melalui uji coba selama kurang lebih dua bulan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Uji coba pengembangan model ini telah melahirkan konsep model dan perangkat-perangkatnya seperti bahan ajar, panduan identifikasi dan kurikulum.
2. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian penerapan model dan perangkat-perangkatnya rata rata responden/pengguna menyatakan baik.
3. Sebagai suatu konsep model yang di ujicoba secara terbatas dan waktu yang relatif kurang, model pendidikan kecakapan hidup pola kemitraan kewirausahaan bagi buruh nelayan dan atau keluarganya dapat diterapkan pada daerah yang memiliki karakteristik yang sama.
4. Secara kualitatif penerapan model ini telah merubah pola pikir masyarakat pesisir dari buruh nelayan tangkap ke pengolahan hasil laut.

2. Rekomendasi

Sebagai suatu model yang diuji coba pada lingkup dan waktu yang sangat terbatas, masih terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu model ini perlu ditindaklanjuti dan dilakukan pendampingan dan melakukan kemitraan yang lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. 1999. *Membangun Kembali Karakter Bangsa. Peran dan Tantangan Perguruan Tinggi*. Makalah (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Panitia Seminar Humaniora Diesnatalis ke 50 Universitas Gadjah Mada.
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Coombs, P. & Manzoor, H.A. 1994. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Rajawali.
- Dietriech G. Bogen, 2001, *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut, Pusat Kegiatan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Institut Pertanian Bogor
- Gibbs, G., 1981. *Teaching Studies to Learning*. Melton Keynes: The Open University Press.
- H.A.R. Tilaar. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung. PT. Remaja Roshakarya.
- . 2000. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani*. Bandung: PT. Remaja Roshakarya.
- Indrakusuma, A.D. 1989. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Naional
- Knowles, M.S. 1984. *Andragogy in Action: Applying Modern Prinsiples of Adult Learning*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Napitupulu, W.P. 1999. *Pengembangan dan Pelembagaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dalam Mencerdaskan Bangsa*". Pada seminar sehari Pengembangan PLS Memasuki Meleneum Ketiga Dalam rangka Peringatan HAI ke 34 tahun 1999. Jakarta: Crown-Dikmas.
- Rogers, A (1993), *Adult Learning for Development*. London. Cassel.
- Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Ginting, M.J Sitepu, 1996, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradya Paramita, Jakarta
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Y A 3 Malang
- Smith, D. Dan M.J. Offerman (1989), *"The Management of Adult and Continuing Education"*. *Handbook of Adult and Continuing Education*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, Bandung
- Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar isi untuk program paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang standar proses Pendidikan Kesetaraan program paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: CV. Eko Jaya.